



Dorong Benahi Laporan Keuangan

GUBERNUR Kalimantan Barat Cornelis berharap seluruh pemerintah di Kalimantan Barat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

"Saya berharap tahun depan provisi dan semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat memperoleh WTP atas laporan keuangannya. Ini mencerminkan pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah Kalbar sudah berjalan baik," harap Cornelis saat acara ramah tamah dan makan malam dengan Anggota VI BPK-RI Bahrullah Akbar di Istana Rakyat Kalimantan Barat, Selasa malam (13/12).

Selain Pemerintah Provinsi, saat ini sudah empat Kabupaten dan satu kota mendapatkan WTP. Hadir juga Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar yang baru, Ida Sundari, dan Mantan Kepala BPK Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio, Para Kepala Perwakilan BPK se-Kalimantan, bupati dan wali kota se-Kalbar, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

◆ Ke Halaman 23 kolom 5



HUMAS PEMPROV UNTUK PONTIANAK POST

WTP: Gubernur Kalbar Corelis berbincang dengan Anggota VI BPK Bahrullah Akbar usai ramah tamah dan makan malam di Istana Rakyat Kalimantan Barat.



Dorong Benahi Laporan Keuangan

Sambungan dari halaman 24

Ia berkeyakinan dengan komitmen dan diimbangi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia profesional, kerjasama BPK RI dengan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan harapan masih terbuka lebar.

“Mudah-mudahan sebelum periode saya berakhir. Pada pertengahan 2017, bisa membantu satu kota dan enam kabupaten, sehingga saya tidak meninggalkan utang ketika tidak

lagi menjabat,” ungkap Cornelis.

Kendati demikian ia mengakui kendala yang dihadapi dalam memperoleh WTP itu karena masih berkebutuhan masalah aset. Terutama daerah-daerah pemekaran, sehingga harus dicari jalan keluar terbaiknya.

Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar mendorong daerah yang masih WDP bisa memperoleh penilaian WTP atas laporan keuangannya. BPK, menurutnya membuat ruang untuk berdiskusi pencapaian pe-

nilaian tersebut.

Ia menyebutkan ada empat unsur dalam penilaian BPK. Di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan per-UU, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

“Kami menyambut harapan Gubernur agar tahun depan semua kabupaten/kota di Kalbar bisa WTP. Itu bukan karena BPK tapi karena kinerja pemerintah daerah,” jelasnya. (mse)